

Pengelolaan keuangan sekolah berbasis *good governance* di MTsN 1 Padang Pariaman

Muaddyl Akhyar*, Hamdi Abdul Karim, Susanda Febriani, Ramadhoni Aulia Gusli

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

*muaddylakhyar@gmail.com

Abstract

Financial management School financial management based on Good Governance is a very important approach to ensure the sustainability and improvement of the quality of education in schools, including in Indonesia, including in Indonesia. This study aims to analyze and evaluate the application of the principles of Good Governance in the management of financial management at MTsN 1 Padang Pariaman. This research uses a descriptive qualitative descriptive qualitative approach to examine school financial management based on Good Governance-based school financial management at MTsN 1 Padang Pariaman. The results of this study show that transparency in reporting and access to financial information at MTsN 1 Padang Pariaman still faces significant challenges. Key factors include the lack of effective information distribution mechanisms, limited access to information for stakeholders, as well as a lack of socialization on the importance of financial transparency. Financial reports are often incomplete and lacking in detail, coupled with the absence of standardized reporting standards, further complicating the situation. Nonetheless, efforts such as regular meetings with school committees and the use of information technology show potential for improvement. To improve transparency, it is necessary to increase the capacity of financial managers through intensive training, conduct regular and independent external audits and obtain clear regulatory support from the government. With these steps, it is expected that transparency in financial management at MTsN 1 Padang Pariaman can be improved. This is expected to increase public trust, encourage active stakeholder participation, and ensure more effective use of funds to improve the overall quality of education.

Keywords: *Good Governance; Financial Management; Quality of education*

Abstrak

Pengelolaan keuangan sekolah berbasis *Good Governance* merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji pengelolaan keuangan sekolah berbasis *Good Governance* di MTsN 1 Padang Pariaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan dan akses informasi keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman masih menghadapi tantangan signifikan. Faktor utama termasuk kurangnya mekanisme distribusi informasi yang efektif, keterbatasan akses informasi bagi pemangku kepentingan, serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya transparansi keuangan. Laporan keuangan yang sering kali tidak lengkap dan kurang rinci, ditambah dengan ketiadaan standar pelaporan baku, semakin memperumit situasi ini. Meskipun demikian, upaya seperti rapat rutin dengan komite sekolah dan penggunaan teknologi informasi menunjukkan potensi untuk perbaikan. Demi meningkatkan transparansi, perlu ditingkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui pelatihan intensif, dilakukan audit

eksternal yang rutin dan independen, serta mendapatkan dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman dapat diperbaiki. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan, dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif untuk peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kata kunci: *Good Governance*; Kualitas pendidikan; Pengelolaan Keuangan

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan sekolah berbasis *Good Governance* merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk di Indonesia. *Good Governance* atau tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas yang diterapkan dalam semua aspek pengelolaan organisasi, termasuk keuangan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan berarti bahwa informasi keuangan harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana serta mengawasi proses pengelolaannya. Akuntabilitas mengharuskan setiap pengelola keuangan untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada mereka, yang mencakup penyusunan laporan keuangan yang akurat dan pengawasan yang ketat (Juhji dkk., 2020).

Partisipasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua siswa, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan penggunaan dana, sehingga kebutuhan semua pihak dapat lebih terakomodasi. Responsivitas menuntut pengelola keuangan untuk cepat dan tepat dalam menanggapi kebutuhan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, serta mampu menyesuaikan anggaran dan program keuangan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang terjadi. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan sekolah, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Pemerintah harus menyediakan regulasi dan pedoman yang jelas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Kepala sekolah dan tim pengelola keuangan harus memiliki komitmen dan kapasitas yang memadai, termasuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen keuangan dan *Good Governance* (Utama & Setiyani, 2014).

Penggunaan teknologi informasi dapat mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan, serta meningkatkan transparansi melalui akses data keuangan secara Online (Akhyar dkk., 2023). Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan secara efektif. Dengan penerapan *Good Governance*, pengelolaan keuangan sekolah dapat dilakukan dengan lebih baik, dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal, dan kepercayaan publik terhadap sekolah dapat meningkat. Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (Widodo dkk., 2023).

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Padang Pariaman harus mampu mengelola keuangannya dengan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mencapai tujuan tersebut. Penerapan prinsip transparansi di MTsN 1 Padang Pariaman berarti bahwa laporan keuangan harus disusun secara rutin dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan korupsi. Akuntabilitas di MTsN 1 Padang Pariaman mencakup penyusunan laporan keuangan yang akurat, pengawasan internal yang ketat, dan audit eksternal yang berkala. Partisipasi diwujudkan melalui pembentukan komite sekolah yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, yang berperan dalam merumuskan anggaran dan memantau penggunaan dana. Responsivitas di MTsN 1 Padang Pariaman berarti bahwa setiap keluhan atau saran dari pemangku kepentingan harus ditanggapi dengan cepat dan tepat, serta anggaran dan program keuangan harus disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Implementasi teknologi informasi di MTsN 1 Padang Pariaman dapat membantu dalam penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan secara lebih cepat dan akurat.

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di MTsN 1 Padang Pariaman sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* benar-benar diterapkan. Dukungan dari pemerintah, komitmen dan kapasitas pengelola keuangan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan teknologi informasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah kunci untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di MTsN 1 Padang Pariaman. Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman dapat dilakukan dengan lebih baik, dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal, dan kepercayaan publik terhadap sekolah dapat meningkat. Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di MTsN 1 Padang Pariaman.

Pengelolaan keuangan sekolah di MTsN 1 Padang Pariaman menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Meskipun terdapat kebijakan dan pedoman yang mengatur tata kelola keuangan, pelaksanaannya sering kali kurang optimal. Masalah utama yang dihadapi meliputi kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, yang menyebabkan kesulitan bagi pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai sumber dan penggunaan dana. Selain itu, akuntabilitas yang tidak memadai sering kali mengakibatkan penyalahgunaan dana dan kurangnya pengawasan yang efektif. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua siswa, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan keuangan juga masih terbatas, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka kurang terakomodasi. Responsivitas pengelola keuangan terhadap perubahan kebutuhan dan masukan dari pemangku kepentingan juga masih rendah, menyebabkan ketidakcocokan antara anggaran dan program keuangan dengan kondisi yang aktual. Masalah-masalah ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem

pengelolaan keuangan yang lebih berbasis pada prinsip-prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi tingkat transparansi dalam pelaporan dan akses informasi keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman, (2) Mengevaluasi akuntabilitas pengelola keuangan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan keuangan, (3) Menilai tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan keuangan, dan (4) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman, serta dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan lainnya dalam upaya menerapkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji pengelolaan keuangan sekolah berbasis *Good Governance* di MTsN 1 Padang Pariaman. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang sedang diteliti melalui eksplorasi langsung terhadap konteks dan lingkungan yang sebenarnya (Akhyar dkk., 2024). Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan *Good Governance*. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di sekolah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Transparansi dalam Pelaporan dan Akses Informasi Keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman.

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi dalam pelaporan dan akses informasi keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat upaya-upaya untuk memperbaikinya. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* yang memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan secara tepat waktu dan akurat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses informasi keuangan bagi pemangku kepentingan seperti guru, orang tua siswa, dan masyarakat masih terbatas. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru dan staf administrasi, terungkap bahwa laporan keuangan tidak selalu disampaikan secara

rutin dan detail kepada semua pihak yang berkepentingan. Hanya sebagian dari pemangku kepentingan yang memiliki akses langsung ke laporan keuangan lengkap, sedangkan lainnya hanya mendapatkan informasi yang bersifat umum dan terbatas.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya mekanisme yang jelas dan efektif untuk mendistribusikan informasi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa MTsN 1 Padang Pariaman belum memiliki sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh semua pihak. Sebagian besar laporan keuangan masih disusun secara manual dan didistribusikan dalam bentuk fisik, yang membatasi jangkauan dan aksesibilitas informasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya transparansi keuangan juga menjadi kendala. Banyak guru dan orang tua siswa yang tidak mengetahui hak mereka untuk mengakses informasi keuangan dan bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat partisipasi aktif mereka dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan sekolah (Widyastuti dkk., 2022).

Selain itu, analisis dokumen menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun sering kali tidak lengkap dan kurang rinci. Beberapa pos pengeluaran tidak dijelaskan dengan jelas, dan ada kekurangan dalam penyajian data yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami secara komprehensif penggunaan dana sekolah. Ketiadaan standar pelaporan yang baku juga menyebabkan variasi dalam kualitas dan format laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang kurang transparan ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan dana dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Namun, penelitian juga menemukan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh MTsN 1 Padang Pariaman untuk meningkatkan transparansi keuangan. Salah satunya adalah dengan mengadakan rapat rutin dengan komite sekolah yang melibatkan perwakilan orang tua siswa dan masyarakat. Dalam rapat ini, kepala sekolah dan bendahara menyampaikan laporan keuangan secara umum dan membahas penggunaan dana serta rencana anggaran ke depan. Meskipun langkah ini positif, namun masih perlu ditingkatkan agar informasi yang disampaikan lebih detail dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (Mubin, 2018).

Partisipasi pemangku kepentingan dalam rapat-rapat tersebut juga masih perlu ditingkatkan. Banyak orang tua siswa yang tidak hadir atau tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi karena keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan keuangan sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, MTsN 1 Padang Pariaman dapat mengadopsi teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi keuangan. Penggunaan platform digital seperti *website* sekolah atau aplikasi *mobile* dapat memudahkan distribusi laporan keuangan dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya transparansi

keuangan dan cara mengakses informasi keuangan perlu ditingkatkan (Lawita dkk., 2021).

Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan sekolah sangat penting untuk memastikan transparansi yang lebih baik. Kepala sekolah dan bendahara perlu mendapatkan pelatihan yang memadai tentang manajemen keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Dengan keterampilan yang lebih baik, mereka akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap dan rinci serta mendistribusikannya secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Audit eksternal yang rutin dan independen juga diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan sekolah yang sebenarnya.

Selain itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk regulasi dan pedoman yang jelas mengenai transparansi keuangan di sekolah. Regulasi yang mengatur standar pelaporan keuangan, mekanisme distribusi informasi, dan sanksi bagi pelanggaran transparansi perlu diterapkan secara tegas. Dukungan finansial dan teknis dari pemerintah juga penting untuk membantu sekolah-sekolah seperti MTsN 1 Padang Pariaman dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang lebih baik dan mengadakan pelatihan bagi pengelola keuangan. Dalam jangka panjang, penerapan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan transparansi yang baik, dana yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, transparansi juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati (Setyawan & Juanda, 2020). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi keuangan harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan sekolah di MTsN 1 Padang Pariaman dan sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang signifikan dalam menerapkan transparansi dalam pelaporan dan akses informasi keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman, terdapat juga peluang dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya. Peningkatan sistem informasi keuangan, pelatihan dan pendidikan bagi pengelola keuangan dan pemangku kepentingan, serta dukungan regulasi dari pemerintah merupakan beberapa langkah kunci yang perlu dilakukan. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama dari semua pihak, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di MTsN 1 Padang Pariaman.

B. Evaluasi Akuntabilitas Pengelola Keuangan dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, serta Pengawasan Keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelola keuangan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* yang menuntut setiap pengelola dana untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana tersebut secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di MTsN 1 Padang Pariaman, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.

Dalam hal penyusunan anggaran, prosesnya di MTsN 1 Padang Pariaman umumnya melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan beberapa staf administrasi. Meskipun demikian, partisipasi dari guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa dalam proses penyusunan anggaran masih terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya input yang beragam dan kebutuhan spesifik dari berbagai pihak yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru dan staf, terungkap bahwa mereka sering kali hanya dilibatkan pada tahap akhir atau bahkan setelah anggaran disusun, sehingga peran mereka dalam memberikan masukan masih sangat minim. Keterlibatan yang rendah ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan dalam tahap perencanaan anggaran (Khayati, 2023).

Pelaksanaan anggaran di MTsN 1 Padang Pariaman juga menunjukkan beberapa kendala. Salah satu isu utama yang diidentifikasi adalah kurangnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran. Penelitian ini menemukan bahwa laporan realisasi anggaran sering kali tidak disusun secara rutin dan tidak dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan kesulitan dalam memantau apakah dana yang telah dianggarkan digunakan sesuai dengan rencana atau terdapat penyimpangan. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat ketidakcocokan antara anggaran yang direncanakan dan pengeluaran yang terjadi, yang menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan (Alkurnia & Anggraini, 2017).

Pengawasan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman juga masih perlu ditingkatkan. Saat ini, pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, namun mekanisme pengawasan eksternal yang independen masih kurang optimal. Audit eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga jarang dilakukan dan tidak terjadwal secara rutin. Ketika audit dilakukan, laporan hasil audit tidak selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah, diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan dana sering kali

menjadi kendala dalam melakukan audit yang menyeluruh dan berkualitas (Yoenanto, 2023).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas di MTsN 1 Padang Pariaman. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan dan *workshop* tentang manajemen keuangan dan *Good Governance*. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola keuangan dalam menyusun anggaran yang akurat, melaksanakan anggaran secara efektif, dan melakukan pengawasan yang ketat. Selain itu, adanya komitmen dari kepala sekolah untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses perencanaan dan pengawasan juga merupakan langkah positif.

Peningkatan akuntabilitas juga dapat dicapai dengan mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat membantu dalam penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Di MTsN 1 Padang Pariaman, implementasi teknologi informasi masih dalam tahap awal, namun ada potensi besar untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi ini di masa depan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemangku kepentingan dapat mengakses informasi keuangan secara *real-time*, yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mendukung peningkatan akuntabilitas, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat penting. Komite sekolah yang terdiri dari perwakilan guru, orang tua siswa, dan masyarakat perlu dilibatkan secara lebih intensif dalam semua tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi yang aktif akan memastikan bahwa berbagai kebutuhan dan masukan dari pemangku kepentingan terakomodasi dengan baik, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan pihak terkait juga sangat diperlukan. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang jelas dan tegas mengenai standar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Regulasi ini harus mencakup kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara rutin, melakukan audit eksternal secara berkala, dan menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan finansial dan teknis untuk membantu sekolah-sekolah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan mereka (Abdullah, 2020).

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelola keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diterapkan secara efektif. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, mengadopsi teknologi informasi, meningkatkan kapasitas pengelola keuangan, dan mendapatkan dukungan dari

pemerintah adalah langkah-langkah kunci yang perlu dilakukan. Dengan peningkatan akuntabilitas, pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman, serta menjadi acuan bagi lembaga pendidikan lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan.

C. Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Proses Pengambilan Keputusan Keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman. Partisipasi pemangku kepentingan merupakan salah satu pilar *Good Governance* yang penting, karena melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya untuk melibatkan pemangku kepentingan, tingkat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan keuangan masih kurang optimal.

Pada tahap perencanaan anggaran, partisipasi pemangku kepentingan seperti guru, orang tua siswa, dan komite sekolah masih terbatas. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru dan anggota komite sekolah, terungkap bahwa mereka tidak selalu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan anggaran. Kepala sekolah dan bendahara sering kali menyusun anggaran secara internal dan baru melibatkan pemangku kepentingan lainnya pada tahap akhir, ketika anggaran sudah hampir final. Hal ini mengurangi peluang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang signifikan dan memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas semua pihak yang terlibat. Ketidakterlibatan ini menciptakan kesenjangan antara rencana anggaran dan kebutuhan nyata di lapangan (Nursobah, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan keuangan menjadi salah satu hambatan utama. Banyak guru dan orang tua siswa yang tidak menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam proses ini. Mereka cenderung menganggap bahwa pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab eksklusif kepala sekolah dan bendahara, sehingga partisipasi mereka sering kali pasif. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya partisipasi aktif dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Observasi lapangan dan analisis dokumen juga menunjukkan bahwa rapat-rapat yang diadakan untuk membahas anggaran dan laporan keuangan sering kali kurang efektif dalam

melibatkan semua pemangku kepentingan. Meskipun rapat rutin diadakan, tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dari guru, orang tua siswa, dan anggota komite sekolah masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jadwal rapat yang tidak sesuai dengan kesibukan para pemangku kepentingan, serta kurangnya komunikasi dan informasi yang jelas mengenai agenda rapat dan pentingnya kehadiran mereka. Untuk meningkatkan partisipasi, perlu adanya upaya untuk menjadwalkan rapat pada waktu yang lebih sesuai dan memberikan informasi yang lebih jelas dan rinci sebelumnya (Djuwairiyah dkk., 2021).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme umpan balik dari pemangku kepentingan juga belum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat saluran formal untuk menyampaikan masukan dan keluhan, seperti kotak saran dan pertemuan rutin, namun pemangku kepentingan jarang memanfaatkan saluran-saluran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakpercayaan atau ketidaknyamanan dalam menggunakan mekanisme yang ada, atau mungkin juga kurangnya respons yang memadai dari pihak sekolah terhadap masukan yang diberikan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diperkuat mekanisme umpan balik yang lebih responsif dan transparan, sehingga pemangku kepentingan merasa bahwa masukan mereka dihargai dan ditindaklanjuti dengan baik.

Penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan mengadopsi platform digital seperti *website* sekolah atau aplikasi *mobile*, informasi mengenai rencana anggaran, laporan keuangan, dan agenda rapat dapat disebarkan secara lebih luas dan cepat. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan melalui survei Online atau forum diskusi, sehingga memudahkan mereka untuk berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik di sekolah. Implementasi teknologi informasi ini memerlukan investasi awal, namun manfaat jangka panjang dalam meningkatkan partisipasi dan transparansi akan sangat signifikan. Di sisi lain, penelitian ini menemukan beberapa contoh praktik baik yang telah diterapkan di MTsN 1 Padang Pariaman untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan. Salah satunya adalah pembentukan tim kecil yang terdiri dari perwakilan guru, orang tua siswa, dan komite sekolah untuk membahas isu-isu keuangan secara lebih mendetail sebelum rapat besar diadakan. Tim kecil ini berfungsi sebagai forum diskusi yang lebih fokus dan efisien, serta dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah kepada rapat besar. Praktik ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terstruktur, partisipasi pemangku kepentingan dapat ditingkatkan (A. Munir, 2013).

Dukungan dari pemerintah dan pihak terkait juga sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan pedoman yang jelas mengenai partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan sekolah, serta memberikan dukungan teknis dan finansial untuk mengimplementasikan sistem partisipasi yang lebih baik. Selain itu, pelatihan

dan *workshop* tentang *Good Governance* dan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan juga perlu diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran semua pihak yang terlibat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat beberapa upaya positif, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai partisipasi yang lebih aktif dan bermakna. Upaya peningkatan partisipasi perlu dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan mekanisme umpan balik, penggunaan teknologi informasi, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Dengan partisipasi yang lebih baik, pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem partisipasi pemangku kepentingan di MTsN 1 Padang Pariaman, serta menjadi acuan bagi lembaga pendidikan lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan.

D. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis *Good Governance* di MTsN 1 Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan keuangan berbasis *Good Governance* di MTsN 1 Padang Pariaman. Prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di sekolah ini, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat.

Salah satu faktor pendukung utama adalah komitmen dari pimpinan sekolah. Kepala sekolah di MTsN 1 Padang Pariaman menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari upaya kepala sekolah untuk menyusun anggaran secara transparan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengadakan rapat rutin untuk membahas laporan keuangan. Komitmen ini menjadi dasar yang kuat untuk mendorong seluruh staf dan pemangku kepentingan lainnya agar terlibat aktif dalam proses pengelolaan keuangan. Selain itu, dukungan dari staf administrasi yang kompeten juga menjadi faktor pendukung penting. Bendahara dan staf administrasi di MTsN 1 Padang Pariaman memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam manajemen keuangan. Mereka mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, melakukan pencatatan transaksi secara rinci, dan memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat dilaksanakan dengan efektif.

Kompetensi ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah (M. Munir & Sholikhah, 2023).

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan. Implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan distribusi informasi keuangan. Dengan adanya sistem ini, semua transaksi keuangan dapat tercatat secara *real-time*, dan laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang signifikan dalam penerapan *Good Governance* di MTsN 1 Padang Pariaman. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun staf administrasi yang ada kompeten, jumlah mereka masih terbatas, sehingga beban kerja yang tinggi dapat mengurangi efektivitas dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Keterbatasan ini juga berdampak pada kurangnya waktu untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang penting untuk menjaga akuntabilitas (Juhji dkk., 2020).

Keterbatasan dana operasional juga menjadi kendala yang menghambat penerapan *Good Governance*. MTsN 1 Padang Pariaman, seperti banyak sekolah lainnya, menghadapi tantangan dalam mendapatkan dana yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan dan program sekolah. Kekurangan dana sering kali memaksa sekolah untuk mengambil keputusan yang pragmatis dan kurang ideal, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan dana juga menghambat upaya untuk mengimplementasikan teknologi informasi yang lebih canggih dan melakukan pelatihan bagi staf. Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya partisipasi pemangku kepentingan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak guru, orang tua siswa, dan anggota komite sekolah tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan pemangku kepentingan. Kurangnya partisipasi ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas, serta menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif (Utama & Setiyani, 2014).

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan sekolah. Beberapa regulasi yang ada masih bersifat umum dan kurang spesifik dalam mengatur standar akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, implementasi regulasi juga sering kali kurang konsisten, sehingga menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di tingkat sekolah. Ketiadaan panduan yang jelas dan tegas dari pemerintah juga menjadi kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara efektif.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, penelitian merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia di bidang administrasi keuangan. Rekrutmen staf tambahan dan pelatihan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Kedua, peningkatan dana operasional melalui berbagai sumber, termasuk dana pemerintah, swasta, dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk mendukung kegiatan sekolah dan implementasi teknologi informasi yang lebih baik. Ketiga, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan perlu menjadi prioritas. Sekolah dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya partisipasi dalam pengelolaan keuangan, serta memperbaiki komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui berbagai saluran, termasuk rapat rutin, buletin sekolah, dan platform digital. Dengan partisipasi yang lebih aktif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan. Keempat, revisi dan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan tegas mengenai *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan sekolah diperlukan. Pemerintah perlu menyediakan panduan yang jelas dan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan secara konsisten di semua sekolah. Dukungan teknis dan finansial dari pemerintah juga penting untuk membantu sekolah dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik (Khayati, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, terdapat juga banyak faktor pendukung yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berbasis *Good Governance* di MTsN 1 Padang Pariaman. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan dana operasional, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, dan penguatan regulasi merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini. Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang lebih baik, pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman, serta menjadi acuan bagi lembaga pendidikan lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa transparansi dalam pelaporan dan akses informasi keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa upaya untuk memperbaikinya. Tantangan utama meliputi kurangnya mekanisme distribusi informasi yang efektif, keterbatasan akses informasi keuangan bagi pemangku kepentingan, serta kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya transparansi keuangan. Selain itu, laporan

keuangan yang sering kali tidak lengkap dan kurang rinci serta ketiadaan standar pelaporan yang baku memperburuk situasi ini. Namun, upaya seperti rapat rutin dengan komite sekolah dan penggunaan teknologi informasi untuk distribusi laporan keuangan menunjukkan potensi perbaikan yang perlu ditingkatkan. Untuk memastikan transparansi yang lebih baik, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan, audit eksternal yang rutin dan independen, serta dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan di MTsN 1 Padang Pariaman dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan, dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. I. (2020). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah serta Dampak Terhadap Kinerja Guru Pada Madrasah Tsanawiyah Muqim Sunnah Palembang*. 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
- Akhyar, M., Kustati, M., Amelia, R., & Syafitri, A. (2023). Manajemen kompetensi guru PAI dalam pembentukan akhlakul karimah siswa. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4 (3), 241–248.
- Akhyar, M., Nelwati, S., & Khadijah, K. (2024). The Influence Of The Profile Strengthening Of Pancasila Students (P5) Project On Student Character At SMPN 5 Payakumbuh. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6 (1).
- Alkurnia, R., & Anggraini, A. (2017). Pengelolaan Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan (Studi Pada Sekolah Al-Islam Dan Muhammadiyah Di Surakarta). *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3 (1).
- Djuwairiyah, Muqit, A., & Listiana, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 4 (2), 81–92.
- Juhji, J., Syarifudin, E., Shobri, S., & Hidayatullah, H. (2020). Accountability and Good Governance in Islamic Educational Management: A Library Study. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 2 (3), 281–292.
- Khayati, S. Q. (2023). Transparansi Keuangan Berbasis Good Governance di Pondok Pesantren Al Multazam Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3 (2), 181–187.
- Lawita, N. F., Suriyanti, L. H., Sari, D. F., Samsiah, S., Agustiawan, A., & Ramashar, W. (2021). Sosialisasi Manfaat Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2 (2), 194–199.
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14 (2), 80–92.
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8 (2).
- Munir, M., & Sholikhah, I. K. (2023). Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan. *CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 2 (2), 65–71.
- Nursobah, A. (2022). Manajemen Pembiayaan pada Lembaga Pendidikan Islam. *AN-NAHDLIYYAH: Jurnal Studi Keislaman*, 1 (1), h. 4.
- Setyawan, S., & Juanda, A. (2020). Pendampingan Pengelolaan Anggaran Keuangan Dan Aset SD Muhammadiyah 08 dan SMP 06 DAU. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 1 (1), 18–31.

- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responbilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 9 (2), 100–114.
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1 (2), 146–167.
- Widyastuti, A., Titong, W. O., & Ulum, I. (2022). Kompetensi SDM Sebagai Mediasi Dalam Good Governance Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12 (2), 378–397.
- Yoenanto, N. H. (2023). Strategi Pendidikan Dasar Untuk Mencapai Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 7(2), 115–120.